

DAFTAR PUSTAKA

- Adolph, R. (2016). *Pengelompokkan Pajak*. 1–23.
- Ahmand Zaki dan Diyan. (2020). Pengertian Tarif perpajakanYusri. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 7(2), 809–820.
- Alex, konsultan pajak. (n.d.). *Kantor Konsultan Pajak dan Kuasa Hukum Pengadilan Pajak Alex dan Rekan*. <http://www.alexdanrekan.com/>
- Amah, N., & Sudrajat, A, A. (2021). *Perpajakan : Teori & Praktikum*. 1–23.
- Badan Pusat Statistik. (2015). *Penerimaan Pajak Dalam Negeri*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA3MCMY/realisasi-pendapatan-negara--milyar-rupiah-.html>
- BPK.RI. (2021). Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). *Republik Indonesia*, 12(November), 1–68. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234926/perpu-no-2-tahun-2022%0Awww.djpk.depkeu.go.id>
- DDTC, P. (n.d.). *Undang-Undang No.42 Tahun 2009*. <https://perpajakan.ddtc.co.id/sumber-hukum/peraturan-pusat/undang-undang-42-tahun-2009>
- DJP. (2007). Undang-Undang No.28 Tahun 2007. , 7(3), 213–221.
- DJP. (2022). *Pajak.go.id*. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/lima-jenis-tarif-pph-badan-yang-wajib-diperhatikan>
- Feronika, 2020. (2022). *ANALISIS SELISIH DASAR PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DENGAN DASAR PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT 2 STUDI KASUS PADA CV ABC*. 16(1), 1–23.
- Ii, B. A. B. (2000). *sistem pemungutan pajak*. 1, 3–4.
- Kemenkeu.go.id. (1983). Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. *Kemenkeu.Go.Id*, 1, 51.

- Kharisma, N., Furqon, I. K., Abdurrahman, U. K. H., & Pekalongan, W. (2023). Analisis Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Masyarakat Dan Inflasi Di Indonesia. *Jurnal Sahmiyya*, 2, 295–303.
- Monita, H. D., & Cahyani, R. R. (2019). Prosedur Penerbitan Surat Permintaan Penjelasan Atas Data atau Keterangan (SP2DK) dalam Pengawasan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, VII(2), 72–90.
- ORTAX. (n.d.). *SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 39/PJ/2015*.
<https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/15866>
- RI, B. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. *Kementerian Sekretariat Negara*, 1–11.
- Rohendi, A. (2014). Fungsi Budgeter Dan Fungsi Regulasi Dalam Ketentuan Perpajakan Indonesia (Santoso Brotodihardjo). *Jurnal Ecodemica: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Bisnis*, 2(1), 119–126.
<http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/ecodemica/article/view/1087/pdf>